

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN
ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL
MODERASI DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI
LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh :

LAURENSIUS INDRO PRAKOSO



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN ALOKASI BELANJA
MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

LAURENSIUS INDRO PRAKOSO

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER MANAJEMEN

Pada

Program Pascasarjana Magister Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL
SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh :
Laurensius Indro Prakoso**

ABSTRAK

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera yang tercermin dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah merupakan tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal, dan penyelenggaraannya di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi fiskal dapat dilihat dengan mengetahui kinerja keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh dari kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, dan efektivitas PAD terhadap IPM dengan belanja modal sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini menggunakan struktur data panel dari 14 kabupaten/kota selama lima tahun (2011-2015). Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi dan efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap IPM, sedangkan rasio ketergantungan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap IPM. Hasil pengujian statistik juga menunjukkan bahwa alokasi belanja modal memperlemah pengaruh rasio derajat desentralisasi pada IPM dan memperkuat pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah pada IPM.. Namun, alokasi belanja modal tidak signifikan memoderasi pengaruh rasio ketergantungan keuangan daerah dan efektivitas PAD pada IPM.

Kata Kunci : derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, alokasi belanja modal, dan IPM.

**THE EFFECT OF REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE
TO HUMAN DEVELOPMENT INDEX WITH CAPITAL EXPENDITURES
ALLOCATION AS MODERATING VARIABLE IN DISTRICTS/CITIES
OF LAMPUNG PROVINCE**

**By :
Laurensius Indro Prakoso**

ABSTRACT

The objective of national development is to create a prosperous Indonesian society reflected by the Human Development Index (HDI). Accelerating the realization of community welfare in the regions is the objective of implementing fiscal decentralization, and its implementation in the regions is the responsibility of local governments. The ability of local governments to undertake fiscal decentralization can be seen by know the financial performance of the region. This study aims to determine empirically the influence of regional financial performance as measured by the ratio of degrees of decentralization, regional financial dependence, regional financial independence, and performance of PAD to HDI with capital expenditure as a moderating variable.

This study uses panel data structures from 14 districts/cities for five years (2011-2015). The result of statistical test shows that the degree of decentralization and effectiveness of PAD has a positive effect on the HDI, while the regional financial dependency ratio and regional financial independence have negative effect on the HDI. The results of statistical tests also show that capital expenditure allocations weaken the effect of decentralization degree ratios on HDI and reinforce the influence of local financial independence ratios on HDI. However, capital expenditure allocations do not significantly moderate the influence of regional financial dependency ratios and PAD effectiveness on IPM.

Keywords: degree of decentralization, regional financial dependency, regional financial independence, PAD effectiveness, capital expenditure allocation, and HDI.

Judul Tesis : PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

Nama Mahasiswa : LAURENSIUS INDRO PRAKOSO

No. Pokok Mahasiswa : 1521011052

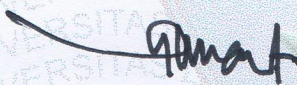
Konsentrasi : MPKD

**Program Studi : Magister Manajemen
Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**

MENYETUJUI

Pembimbing I,

Pembimbing II,

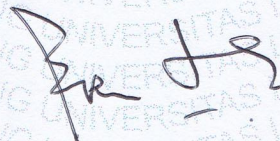


Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.
NIP 19560325 198303 1 002



Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si.
NIP 19691128 200012 2 001

**Ketua Program Studi Magister Manajemen
Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung,**



Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si.
NIP 19691128 200012 2 001

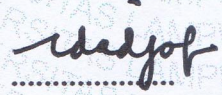
MENGESAHKAN

1. Komisi Penguji :

1.1. Ketua Penguji : **Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.**
(Pembimbing I)


.....

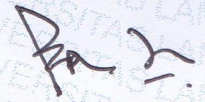
1.2. Penguji I : **Dr. Ida Budiarty, S.E., M.Si.**


.....

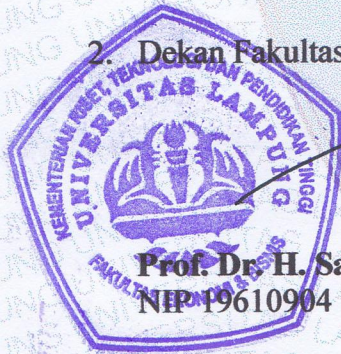
1.3. Penguji II : **Dr. Ribhan, S.E., M.Si.**


.....

1.4 Sekretaris Penguji : **Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si.**
(Pembimbing II)


.....

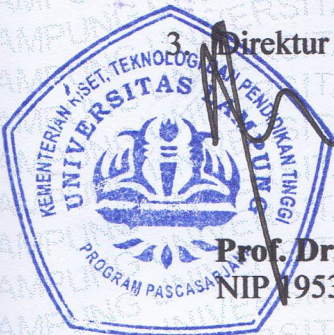
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung,



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011



3. Direktur Program Pascasarjana,



Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : 20 April 2017

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiatisme;
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, dan bersedia serta sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, April 2017

Pembuat Pernyataan,



Laurensius Indro Prakoso

NPM. 1521011052

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 1984. Anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Fredericus Widaryanto dan Ibu Maria Regina Suryani. Penulis telah menikah dengan Dwi Padma Yoni dan telah dikaruniakan seorang putri bernama Caterina Dahayu Putri.

Penulis mengenyam pendidikan sekolah dasar di SD Maria Fransiska Bekasi pada Tahun 1990 sampai dengan Tahun 1996, lalu melanjutkan ke sekolah menengah di SLTP dan SMU Marsudirini Bekasi sampai dengan Tahun 2002. Selanjutnya, Penulis melanjutkan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Trisakti, dan berhasil menyelesaikan perkuliahan pada Tahun 2007.

Pada Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008, penulis bekerja sebagai *Management Trainee* pada PT. Tunas Ridean, Tbk. Selanjutnya sejak Tahun 2008 sampai dengan sekarang, penulis bekerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kemudian, pada Tahun 2015, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S2 di Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Program Studi Magister Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Pemerintahan dan Keuangan Daerah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung”** merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (Unila).

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila;
2. Ibu Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Pascasarjana Unila sekaligus Pembimbing II atas kesediaan waktu dan pemikirannya dalam memberikan bimbingan dan saran pada proses penyelesaian tesis ini;
3. Bapak Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si., selaku Pembimbing I atas kesediaan waktu dan pemikirannya dalam memberikan bimbingan dan saran pada proses penyelesaian tesis ini;
4. Ibu Dr. Ida Budiarty, S.E., M.Si., selaku Penguji I dalam memberikan masukan dan saran yang membangun pada saat seminar dan ujian;
5. Bapak Dr. Ribhan, S.E., M.Si., selaku Penguji II dalam memberikan masukan dan saran yang membangun pada saat seminar dan ujian;
6. Istriku tercinta Dwi Padma Yoni, dan putriku Caterina Dahayu Putri atas yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi;
7. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan Tahun 2015 Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila; dan
8. Rekan-rekan kerja di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun sedikit harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, April 2017

Penulis,

Laurensius Indro Prakoso

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK.....	
<i>ABSTRACT</i>	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN.....	
RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	17
II. TINJAUAN PUSTAKA, MODEL PENELITIAN, DAN HIPOTESIS	
PENELITIAN	18
2.1 Teori Keagenan.....	18
2.2 Teori Kontijensi	20

2.3 Teori Pertumbuhan Endogen	21
2.4 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah.....	23
2.5 Desentralisasi dan Federalisme Fiskal.....	25
2.6 Anggaran Berbasis Kinerja.....	29
2.7 APBD dalam Era Otonomi Daerah.....	30
2.8 Kinerja Keuangan Daerah (Fiskal)	32
2.9 Kebijakan Fiskal untuk Pembangunan Ekonomi.....	37
2.10 Belanja Modal.....	39
2.11 Indeks Pembangunan Manusia	42
2.12 Penelitian Terdahulu	49
2.13 Model Penelitian.....	53
2.14 Pengembangan Hipotesis.....	53
III. METODE PENELITIAN	63
3.1 Jenis Penelitian	63
3.2 Populasi dan Metode Pengambilan Sampel.....	63
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	64
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	64
3.5 Variabel Penelitian.....	64
3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	65
3.7 Teknik Analisis Data	68
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	81
4.2 Analisis Data.....	84
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	92

4.4 Hasil Estimasi Regresi Model <i>Fixed Effect</i>	95
4.5 Pengujian Hipotesis	101
4.6 Pembahasan	107
V. SIMPULAN DAN SARAN	117
5.1 Simpulan	117
5.2 Keterbatasan dan Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan IPM Provinsi Lampung.....	3
Tabel 1.2 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	4
Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu.....	49
Tabel 3.1 Jenis-jenis Variabel Moderator.....	73
Tabel 4.1 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	81
Tabel 4.2 Komposisi Belanja Modal dalam APBD TA 2010-2014	82
Tabel 4.3 Komposisi PAD dan Pend. Transfer dalam APBD TA 2011- 2015.....	82
Tabel 4.4 Hasil Statistik Deskriptif.....	84
Tabel 4.5 Uji <i>Chow</i> persamaan <i>unmoderated</i>	91
Tabel 4.6 Uji <i>Chow</i> persamaan <i>moderated</i>	91
Tabel 4.7 Uji <i>Hausman</i> persamaan <i>unmoderated</i>	91
Tabel 4.8 Uji <i>Hausman</i> persamaan <i>moderated</i>	92
Tabel 4.9 Hasil Uji Korelasi Parsial	92
Tabel 4.10 Hasil Perbandingan FE <i>Unweight</i> dan <i>Weight</i> Model <i>Unmoderated</i>	95
Tabel 4.11 Hasil Estimasi Model <i>Fixed Effect</i>	95
Tabel 4.12 Perbedaan Nilai Intersep Kabupaten/Kota.....	100
Tabel 4.13 IPM Kabupaten/Kota dengan Intersep.....	100

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Penelitian	53
Gambar 3.1 Penentuan Autokorelasi	77
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas pada Persamaan <i>Unmoderated</i>	93

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Hasil Statistik Deskriptif	L-1
Lampiran 2. Hasil Uji Chow persamaan <i>Unmoderated</i>	L-2
Lampiran 3. Hasil Uji Chow persamaan <i>Moderated</i>	L-3
Lampiran 4. Hasil Uji Hausman persamaan <i>Unmoderated</i>	L-4
Lampiran 5. Hasil Uji Hausman persamaan <i>Moderated</i>	L-5
Lampiran 6. <i>Output weight</i> model <i>Fixed Effect Unmoderated</i>	L-6
Lampiran 7 <i>Output</i> Estimasi Model <i>Fixed Effect</i> pada Persamaan <i>Unmoderated</i> dan <i>Moderated</i>	L-7

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan manusia diharapkan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan, karena hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia, maka perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan pembangunan manusia dalam penyusunan anggaran (Christy *et.al*, 2009). Pembangunan manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan di suatu wilayah, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak.

IPM atau disebut juga *Human Development Index* (HDI) merupakan sebuah indeks komposit (gabungan) dari indeks pendidikan, kesehatan, dan daya beli yang diharapkan dapat mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia yang tercermin dengan penduduk yang berpendidikan, sehat dan berumur panjang, berketerampilan serta mempunyai pendapatan untuk layak hidup (Badan Pusat Statistik/BPS, 2015).

Sejak tahun 1990, perkembangan tingkat kualitas hidup manusia (indeks HDI) di seluruh dunia diteliti dan laporannya diterbitkan dalam buku laporan pembangunan manusia (*Human Development Report/HDR*) oleh UNDP. Laporan tahunan UNDP pada tahun 2014 menginformasikan bahwa IPM Indonesia mengalami penurunan yaitu berada pada peringkat

110 dari 188 negara, dari peringkat 108 dari 187 negara pada tahun 2013. Menurut laporan tahunan UNDP tahun 2013, IPM Indonesia ternyata masih berada di bawah negara-negara *Regional Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yaitu Malaysia yang menempati peringkat 62, Singapura peringkat 9, Thailand pada peringkat 89, dan Brunei Darussalam di posisi 30. IPM Indonesia hanya lebih baik bila dibandingkan dengan IPM Myanmar yang menduduki posisi 150, Filipina 117, Kamboja 136, Timor Leste pada posisi 128, dan Vietnam pada posisi 121.

Penurunan IPM Indonesia di skala internasional, dipengaruhi oleh perkembangan IPM di dalam negeri. Perkembangan IPM di Indonesia baik untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dipublikasikan oleh BPS setiap tahunnya. Pada tahun 2015, BPS melakukan perubahan metodologi perhitungan IPM. Perubahannya adalah Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah pada metode baru. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita pada metode lama diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita pada metode baru. Penghitungan metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik pada metode baru. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Selain itu, dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan

pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Berdasarkan data BPS, IPM dalam tingkat nasional dan provinsi cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2011-2015. IPM Provinsi Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya namun interval perubahannya mengalami penurunan sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perkembangan IPM Provinsi Lampung

Provinsi Lampung	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
IPM	64,20	64,87	65,73	66,42	66,95
Interval antar Tahun	0,49	0,67	0,86	0,69	0,53

Sumber: BPS, 2015 (data diolah)

Data IPM Provinsi Lampung dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan seperti ditunjukkan pada Tabel 1.1 yaitu dari 64,20 pada tahun 2010 menjadi 66,95 pada tahun 2015, namun interval perubahan IPM sejak tahun 2013-2015 mengalami penurunan. Hal ini berarti terjadi ketidakkonsistenan peningkatan IPM di Provinsi Lampung.

Ketidakkonsistenan peningkatan IPM di tingkat provinsi merupakan dampak dari perkembangan IPM di Kabupaten/Kota. Perkembangan IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

No.	Kab/Kota	Indeks Pembangunan Manusia								
		2011	^{*)} Int	2012	^{*)} Int	2013	^{*)} Int	2014	^{*)} Int	2015
1.	Lampung Barat	61,92	0,59	62,51	0,7	63,21	0,33	63,54	1	64,54
2.	Tanggamus	60,63	0,51	61,14	0,75	61,89	0,78	62,67	0,99	63,66
3.	Lampung Selatan	61,95	0,73	62,68	0,67	63,35	0,4	63,75	1,47	65,22
4.	Lampung Timur	64,10	1	65,10	0,97	66,07	0,35	66,42	0,68	67,10
5.	Lampung Tengah	64,71	0,89	65,60	0,97	66,57	0,5	67,07	0,54	67,61
6.	Lampung Utara	62,67	0,26	62,93	1,07	64	0,89	64,89	0,31	65,20
7.	Way Kanan	62,04	0,75	62,79	1,13	63,92	0,4	64,32	0,86	65,18
8.	Tulang Bawang	63,67	0,44	64,11	0,8	64,91	0,92	65,83	0,25	66,08
9.	Pesawaran	59,44	0,54	59,98	0,96	60,94	0,76	61,70	1	62,70
10.	Pringsewu	64,86	0,51	65,37	0,77	66,14	0,44	66,58	0,97	67,55
11.	Mesuji	57,32	0,35	57,67	0,49	58,16	0,55	58,71	1,08	59,79
12.	Tulang Bawang Barat	60,13	0,64	60,77	0,69	61,46	1	62,46	0,55	63,01
13.	Bandar Lampung	72,04	0,84	72,88	1,05	73,93	0,41	74,34	0,47	74,81
14.	Metro	72,23	0,63	72,86	1,41	74,27	0,71	74,98	0,12	75,10
	Provinsi Lampung	64,20	0,67	64,87	0,86	65,73	0,69	66,42	0,53	66,95

^{*)} Int = interval perubahan

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2015 (data diolah)

Data IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dari tahun 2011-2015 seperti ditunjukkan pada Tabel 1.2 selalu mengalami peningkatan, namun, jika diperhatikan dengan lebih seksama, interval perubahan IPM kabupaten/kota sejak tahun 2013-2015 mengalami fluktuasi.

IPM digunakan sebagai salah satu ukuran untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. IPM dapat mengukur tingkat kesejahteraan baik dari sisi sosial dan ekonomi. Dari sisi sosial, indeks harapan hidup (*longevity*) dalam perhitungannya menggunakan data Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH), serta indeks pendidikan/pengetahuan (*knowledge*) dalam perhitungannya menggunakan data angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan dari sisi ekonomi, indeks standar hidup layak (*decent living*) dalam

perhitungannya menggunakan data nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*).

Percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah merupakan tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal, dan penyelenggaraannya di daerah menjadi tanggung jawab pemerintahan di daerah. Menurut Oates (1993) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), karena pemerintah daerah (*local government*) akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik.

Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan mandat undang-undang (UU), yaitu UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, dan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 selanjutnya direvisi kembali dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2015. Sejak berlakunya kedua regulasi tersebut, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengelola berbagai sumber dayanya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat, seperti dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran.

Penganggaran merupakan komitmen resmi bagi pemerintah yang terkait dengan rancangan keuangan atau ekspektasi mengenai berapa jumlah pendapatan yang akan diterima dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

satu periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pada level pemerintah daerah merupakan bentuk pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran belanja daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Penetapan prioritas-prioritas tersebut beserta upaya pencapaiannya merupakan konsekuensi dari meningkatnya peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Saat perencanaan pembangunan, IPM dapat digunakan sebagai tuntunan dalam menentukan prioritas saat merumuskan kebijakan dan menentukan program (Budiriyanto, 2011).

UU Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi pengelolaan keuangan daerah. APBD menunjukkan sumber pendapatan daerah, berapa besar alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan, serta pembiayaan yang muncul bila terjadi surplus atau defisit. Dengan adanya APBD, pemerintah memiliki gambaran

mengenai pendapatan dan sumber pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah dapat berupa pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanjanya. Selanjutnya pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pemerintah daerah memiliki peran dalam menggunakan pendapatan daerahnya untuk pembangunan ekonomi daerah. Arsyad (1999) menjelaskan pembangunan ekonomi daerah, yaitu suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya lokal yang ada untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang berkembangnya kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pengelolaan sumber daya lokal merupakan proses pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam atau pertumbuhan endogen (*endogenous growth*). Model pertumbuhan endogen menerangkan peran aktif kebijakan publik dalam meningkatkan pembangunan ekonomi melalui investasi langsung maupun tidak langsung terhadap manusia (*human capital*).

Pemerintah daerah dalam menuangkan kebijakannya di daerah dapat menggunakan instrumen kebijakan fiskal seperti pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan untuk belanja pada sektor-sektor yang dapat

meningkatkan IPM. Ketidakkonsistenan peningkatan IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung mengindikasikan bahwa pendapatan daerah yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung belum optimal digunakan untuk meningkatkan IPM.

Pendapatan daerah merupakan kemampuan keuangan daerah yang antara lain berupa PAD. PAD seharusnya dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah dan pemanfaatannya benar-benar untuk anggaran yang produktif dan dapat dirasakan oleh masyarakat seperti pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Bila dilihat berdasarkan rata-rata pertumbuhan PAD, Provinsi Lampung memiliki rata-rata pertumbuhan PAD dari tahun 2009-2013 yang tertinggi kedua yaitu sebesar 29,5% per tahunnya (DJPK, 2013). Hal ini berarti, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dapat menjaga pertumbuhan fiskal atau pajak di daerah yang merupakan komponen PAD, dan selanjutnya diikuti dengan berkurangnya ketergantungan pendanaan daerah dari pihak luar.

Kemampuan daerah dalam menjalankan desentralisasi fiskal dapat dilihat dengan mengetahui kinerja keuangan daerah. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan di daerah adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007:231). Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Sularso dan Restianto, 2011). Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi

keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Dalam organisasi pemerintahan, terdapat beberapa rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan APBD yang merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintahan. Menurut Helfert (2000 : 49) mengartikan rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan.

Kajian empiris mengenai kinerja keuangan daerah dan IPM telah banyak dilakukan. Diantaranya penelitian oleh Suryaningsih *et.al.* (2015) menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2001 sampai 2011, dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas keuangan daerah, dan upaya pemungutan PAD sebagai indikator kinerja keuangan daerah. Anggraini (2015) meneliti pengaruh rasio kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap IPM pada pemerintah provinsi di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap IPM.

Penelitian oleh Batafor (2011) yang melakukan evaluasi kinerja keuangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja menyebabkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM.

Beberapa kajian empiris mengenai kinerja keuangan daerah dan IPM telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini mengambil rasio kinerja keuangan daerah yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas PAD.

Rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (Mahmudi, 2010:142).

Sejak pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan bisa menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan PAD, sehingga ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi (Mahmudi, 2010:142).

Daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah lainnya. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini

menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010:142).

Keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan, salah satunya bisa diukur dengan efektivitas pelaksanaan anggaran tersebut. Hal tersebut bisa diketahui dengan mengukur rasio efektivitas. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan anggaran PAD (Mahmudi, 2010:143). Menurut Fitri (2013), rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Semakin tinggi rasio efektivitas ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Rasio derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, dan efektivitas PAD merupakan pengukuran kinerja keuangan daerah yang menggunakan pendapatan daerah khususnya PAD sebagai alat ukurnya. Besarnya rasio derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, dan efektivitas PAD, serta kecilnya rasio ketergantungan keuangan daerah memiliki arti bahwa suatu daerah dapat memenuhi kebutuhan belanja daerahnya dengan menggunakan PAD sebagai komponen utama sumber pendanaannya. Menurut Halim (2007), ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Waluyo (2007) menyatakan bahwa idealnya semua pengeluaran daerah dapat dipenuhi

dengan menggunakan PAD sehingga daerah dapat benar-benar otonom, tidak lagi tergantung ke pemerintah pusat. Selain itu, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Desentralisasi fiskal pada dasarnya berkaitan dengan dua hal pokok, yakni kemandirian daerah dalam memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik dan pembangunan, dan kemandirian daerah dalam memperoleh pendapatan untuk membiayai pengeluaran tersebut (Muluk, 2005).

Syamsi (1986) dalam Susantih dan Saftiana (2009) menyatakan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah (PAD) guna memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat, sehingga memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keleluasaan dalam penggunaan PAD dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran daerah untuk investasi publik yang secara langsung dapat dirasakan masyarakat dan mendukung peningkatan indeks kesehatan atau harapan hidup, pendidikan, dan paritas daya beli yang ketiganya merupakan dasar pengukuran IPM. Secara empiris, Alexiou (2009) dan Rahayu (2004) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk investasi

publik menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Produktifitas dan pemerataan merupakan premis penting dalam definisi atau konsep pembangunan manusia menurut UNDP (HDR, 1995:103). Produktifitas dapat tercipta bila penduduk memiliki pendidikan dan kesehatan yang baik, dan selanjutnya meningkatkan kapasitas serta berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi atau meningkatkan daya beli penduduk. Pemerataan dapat tercipta bila penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Akses tersebut dapat berupa sarana dan prasarana publik untuk memperlancar aktifitas ekonomi dan sosial penduduk yang pembangunannya dibiayai dari belanja modal pemerintah daerah.

Belanja modal secara umum dialokasikan untuk sarana dan prasarana publik, dalam bentuk aset tetap yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan aset tetap lainnya, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Fasilitas publik yang disediakan pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung aspek pembangunan manusia di wilayahnya, seperti gedung/bangunan sekolah yang layak dan ketersediaan alat peraga atau laboratorium di setiap sekolah yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar-mengajar, gedung/bangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau puskesmas yang nyaman dan ketersediaan alat kesehatan (alkes) yang memadai di setiap FKTP, serta infrastruktur jalan/jembatan yang

memperlancar akses transportasi dan aktifitas ekonomi suatu wilayah untuk meningkatkan paritas daya beli masyarakat baik komoditas makanan dan non makanan.

Alokasi belanja modal di daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah selaku *agent*, dalam proses pembahasan sampai dengan pengesahan APBD mengalami perubahan karena disesuaikan dengan keinginan DPRD yang merupakan wakil masyarakat dan bertindak sebagai *principal*. *Agent* diharapkan dalam mengambil kebijakan keuangan menguntungkan *principal*, bila merugikan bagi *principal* maka akan timbul masalah keagenan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai oleh *principal* apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Provinsi Lampung memiliki rata-rata pertumbuhan belanja modal yang tertinggi dari tahun 2009-2013 yaitu sebesar 31,6% per tahunnya lalu diikuti oleh Provinsi DKI sebesar 28,1% dan Provinsi Banten sebesar 26,9% (DJPK, 2013). Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dapat memaksimalkan pendapatan daerahnya untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik. Menurut Kusnandar dan Siswantoro (2012), dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik.

Investasi modal yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat menunjang peningkatan

IPM. Penelitian mengenai belanja modal dan IPM pernah dilakukan oleh Sari dan Supadmi (2016) yang menemukan bukti empiris bahwa PAD dan belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan pada peningkatan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008 s.d. 2013. Denni (2012) dalam penelitiannya tentang pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap IPM di Jawa Tengah Tahun 2006-2009 menyimpulkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, namun pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sehingga berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan pada peningkatan IPM.

Dengan demikian, pemerintah daerah harus melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan program-program untuk kepentingan publik sesuai dengan kemampuan atau kinerja keuangan daerahnya untuk memacu atau mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk membuktikan secara empiris pengaruh kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas PAD terhadap kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan IPM, serta moderasi alokasi belanja modal pada setiap rasio kinerja keuangan daerah tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap IPM?
2. Apakah alokasi belanja modal berperan dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas PAD terhadap IPM?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung berupa rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas PAD, serta alokasi belanja modal terhadap IPM.
2. Untuk mengetahui moderasi alokasi belanja modal dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung berupa rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas PAD pada IPM.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis untuk menjelaskan penerapan desentralisasi fiskal dengan menggunakan APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal dapat menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara masyarakat yang diwakili oleh DPRD dan pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam teori keagenan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas wawasan teori keagenan yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan, khususnya mengenai instrumen kebijakan fiskal di daerah yaitu APBD yang dapat mempengaruhi kebijakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung hasil penelitian-penelitian sebelumnya.
2. Secara praktis untuk memberikan kontribusi berupa informasi kepada pemerintah daerah sekaligus sebagai referensi untuk menentukan strategi yang tepat guna menggali pendapatan daerah dengan sumber daya yang dimiliki dan pengalokasian belanja modal untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, MODEL PENELITIAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak dimana satu atau lebih (prinsipal) melimpahkan wewenang kepada orang lain (agen) untuk kepentingan mereka. Permasalahan hubungan keagenan ini mengakibatkan terjadinya informasi asimetris dan konflik kepentingan (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan berusaha mendeskripsikan hubungan antara agen dan prinsipal dengan menggunakan mekanisme suatu kontrak. Teori keagenan menggunakan penekanan pada penyelesaian dua masalah yaitu: a) masalah keagenan yang muncul ketika keinginan/tujuan antara agen dan prinsipal bertentangan, dan sulit bagi prinsipal memverifikasi hasil kerja agen yang sesungguhnya. b) masalah pembagian resiko (*risk sharing*) yang terjadi ketika prinsipal dan agen mempunyai preferensi dan sikap yang berbeda terhadap suatu resiko.

Fokus teori keagenan (Eisenhardt, 1989) adalah penentuan kontrak yang paling efisien mengatur hubungan antara prinsipal dan agen dengan asumsi bahwa: a) manusia mempunyai sifat mementingkan kepentingan diri sendiri, rasionalitas terbatas (*bounded rationality*), keengganan resiko (*risk aversion*); b) organisasi meliputi konflik kepentingan antar anggotanya, dan c) informasi merupakan suatu komoditi dan dapat dibeli.

Teori keagenan dijadikan acuan utama dalam penelitian ini untuk menjelaskan konflik yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat yang diwakili oleh DPRD, berkaitan dengan kebijakan keuangan Daerah. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan kedua belah pihak yang terikat dalam suatu kontrak. Dalam kontrak tersebut pemerintah di samping ingin memuaskan prinsipal juga bertujuan untuk memaksimalkan kepentingannya.

Kaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara *principal* dan *agent*. Masyarakat yang diwakili oleh DPRD adalah *principal* dan pemerintah adalah *agent*. *Agent* diharapkan dalam mengambil kebijakan keuangan menguntungkan *principal*. *Principal* memiliki wewenang pengaturan kepada *agent*, dan memberikan sumber daya kepada agen dalam bentuk pajak, retribusi, dana perimbangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Bila keputusan agen merugikan bagi *principal* maka akan timbul masalah keagenan. Karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen (*assymetric information*) maka *principal* membutuhkan

pihak ketiga yang mampu meyakinkan prinsipal bahwa apa yang dilaporkan oleh *agent* adalah benar.

2.2. Teori Kontijensi

Teori kontijensi adalah tidak ada satu cara terbaik yang dapat digunakan dalam semua keadaan (situasi) lingkungan. Secara umum teori ini menyatakan bahwa perancangan dan penggunaan desain sistem pengendalian tergantung karakteristik organisasi dan kondisi lingkungan dimana sistem tersebut akan diterapkan. Berdasarkan teori kontinjensi maka terdapat faktor situasional lain yang mungkin akan saling berinteraksi dalam suatu kondisi tertentu.

Berbagai penelitian yang menggunakan pendekatan kontijensi dilakukan, dengan tujuan mengidentifikasi berbagai variabel kontijensi yang memengaruhi perancangan dan penggunaan sistem pengendalian. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada ketidakkonsistenan antara satu peneliti dengan peneliti lainnya sehingga para peneliti berkesimpulan bahwa ada variabel lain yang memengaruhinya. Govindarajan (1986) dalam Husnatarina dan Nor (2007) mengemukakan bahwa untuk menyelesaikan perbedaan dari hasil temuan tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontijensi (*Contijency approach*).

Pendekatan kontijensi tersebut memungkinkan adanya variabel-variabel yang dapat bertindak sebagai moderating dan intervening. Murray (1990) dalam Husnatarina dan Nor (2007) menjelaskan bahwa variabel *moderating* adalah variabel yang memengaruhi hubungan antara dua

variabel. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menguji apakah suatu variabel merupakan variabel *moderating* yakni dengan melakukan uji interaksi. Regresi dengan melakukan uji interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) antar variabel disebut dengan *Moderated Regression Analysis/MRA* (Utama, 2009). Dalam penelitian ini, pendekatan kontijensi akan digunakan untuk mengevaluasi keefektifan hubungan antara kinerja keuangan/fiskal daerah dengan IPM. Berdasarkan pendekatan di atas ada dugaan alokasi belanja modal akan memoderasi hubungan antara kinerja fiskal daerah dengan IPM.

2.3. Teori Pertumbuhan Endogen (*Endogenous Growth Theory*)

Teori pertumbuhan endogen memiliki perspektif yang lebih luas daripada teori-teori pertumbuhan sebelumnya. Pada umumnya, teori-teori pertumbuhan ekonomi sebelumnya hanya menekankan pentingnya proses akumulasi modal dalam pertumbuhan ekonomi. Artinya, untuk memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, suatu negara membutuhkan investasi yang tinggi pula.

Teori pertumbuhan endogen mencoba mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam (*endogenous*) sistem ekonomi itu sendiri. Dalam model ini, faktor teknologi memegang peranan penting, namun hal itu bukan berarti bahwa faktor tersebut mampu menjelaskan tentang fenomena pertumbuhan dalam jangka panjang. Romer (1994) menyatakan bahwa akumulasi modal tetap memegang peranan penting dalam

pertumbuhan, namun dengan definisi yang lebih luas yaitu dengan memasukkan unsur modal ilmu pengetahuan (*knowledge capital*) dan insani (*human capital*) ke dalam model. Selain itu, perubahan teknologi merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai faktor yang berasal dari luar model (*exogenous*) (Adisasmita, 2013).

Model pertumbuhan endogen membantu dalam menjelaskan fenomena aliran *capital* antara Negara (dari Negara miskin ke kaya). Model pertumbuhan endogen menerangkan peran aktif kebijakan publik dalam meningkatkan pembangunan ekonomi melalui investasi langsung maupun tidak langsung dalam *human capital* dan mendorong investasi asing dalam industri padat pengetahuan.

Lucas (1988), berargumen bahwa akumulasi modal manusia melalui investasi (misal meningkatkan waktu belajar) mendorong pertumbuhan endogen. Argumentasi menekankan pada keuntungan yang disebabkan oleh eksternalitas dari modal manusia yang cenderung meningkatkan tingkat pengembalian modal manusia. Romer (1990) menyebutkan bahwa modal manusia merupakan input kunci pokok untuk sektor riset karena menyebabkan ditemukannya produk baru atau ide yang disadari sebagai pendorong perkembangan teknologi. Dengan demikian Negara-negara dengan stok awal modal manusia yang lebih tinggi, ekonomi tumbuh lebih cepat. Dengan demikian modal manusia merupakan sumber pertumbuhan yang penting dalam teori pertumbuhan endogen (Kubo dan Kim, 1996).

2.4. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Arsyad (1999), menjelaskan istilah pembangunan ekonomi daerah, yaitu suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk nota kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang berkembang kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak ekonomi yang diterapkan berbeda pula. Jika akan membangun suatu daerah, kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kondisi (masalah, kebutuhan dan potensi) daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya, strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar yaitu:

1. Strategi pengembangan fisik/lokalisasi (*locality or physical development strategy*);
2. Strategi pengembangan dunia usaha (*bussiness development strategy*)

3. Strategi pengembangan sumber daya manusia (*human resource development strategy*)
4. Strategi pengembangan masyarakat (*community based development strategy*)

Strategi pengembangan fisik/lokal ini ditujukan untuk menciptakan identitas daerah/kota, memperbaiki basis pesona (*amenity bases*) atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki daya tarik daerah/kota dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah. Sedangkan strategi pengembangan daerah antara lain melalui penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha dengan pengaturan dan kebijakan yang memberi kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunan kualitas lingkungan.

Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam pembangunan ekonomi. Pengembangan kualitas sumber daya manusia ini antara lain dapat dilakukan dengan pelatihan dengan sistem *costumized training* atau pelatihan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pemberi kerja. Sementara itu strategi pengembangan ekonomi masyarakat merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok tertentu di suatu daerah. Kegiatan tersebut juga sering disebut dengan pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial, misalnya dengan menciptakan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau memperoleh keuntungan usahanya.

2.5. Desentralisasi dan Federalisme Fiskal

Secara umum, desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke level pemerintahan yang ada di bawahnya. Secara teoritis ada beberapa tipe desentralisasi, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administratif, dan desentralisasi fiskal (Osoro, 2003 dalam Khusaini, 2006).

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. UU Nomor 22 Tahun 1999 telah direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, selanjutnya mengalami revisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014, dan perubahan terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2015. Sementara UU Nomor 25 Tahun 1999 telah direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang bidang otonomi daerah tersebut berdampak terhadap terjadinya pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dan diharapkan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah. Menurut undang-undang, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam kaitannya dengan derajat pengambilan keputusan yang dilakukan daerah, setidaknya ada tiga variasi definisi desentralisasi fiskal (Bird, 1993). Pertama, desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah

atau ke pemerintah daerah (dekonsentrasi). Kedua, delegasi berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah. Ketiga, devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan, berada di daerah. Seberapa jauh desentralisasi dapat dilihat dengan jelas, tergantung terhadap apa telah dilakukan apakah lebih bersifat dekonsentrasi, delegasi, atau devolusi.

Menurut Mardiasmo (2002) (dalam Khomsiyah, 2012), terdapat dua alasan pemberian otonomi daerah, yaitu:

1. Intervensi pemerintah pusat telah menimbulkan masalah yaitu rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan demokrasi di daerah;
2. Otonomi merupakan jawaban untuk memasuki kehidupan baru yang membawa peraturan-peraturan baru yang bertujuan agar terciptanya pemerintah daerah yang otonom, efisien, efektif, akuntabel, transparan, dan responsif secara berkesinambungan (*sustainable*).

Desentralisasi fiskal pada dasarnya berkaitan dengan dua hal pokok, yakni kemandirian daerah dalam memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik dan pembangunan, dan kemandirian daerah dalam memperoleh pendapatan untuk membiayai pengeluaran tersebut (Muluk, 2005). Menurut Bahl (2008), terdapat dua manfaat desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Efisiensi ekonomis

Anggaran daerah untuk pelayanan publik bisa lebih mudah disesuaikan dengan preferensi masyarakat setempat dengan tingkat akuntabilitas dan kemauan bayar yang tinggi.

2. Peluang meningkatkan penerimaan pajak dari pajak daerah

Pemerintah daerah bisa menarik pajak dengan basis konsumsi dan aset yang tidak bisa ditarik oleh pemerintah pusat.

Teori federalisme fiskal merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam berbagai kajian tentang federalisme fiskal (*fiscal federalism*), terdapat dua perspektif teori yang menjelaskan dampak ekonomi dari desentralisasi, yaitu *traditional theories (first generation theories)* dan *new perspective theories (second generation theories)*. *Traditional theories* menyatakan terdapat dua keuntungan dari desentralisasi, yaitu:

1. Hayek (1945) dalam Khusaini (2006) mengemukakan tentang penggunaan “*knowledge in society*”, di mana menurut Hayek pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan dipermudah dengan penggunaan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya.
2. Tiebout (1956) dalam Khusaini (2006) mengungkapkan terdapat dimensi persaingan dalam pemerintah daerah dan ia berpandangan bahwa kompetisi antar pemerintah daerah tentang alokasi pengeluaran publik memungkinkan masyarakat memilih berbagai barang dan jasa

publik yang sesuai dengan selera dan keinginan mereka. Hal ini tidak akan terjadi dalam pemerintahan sentralistik jika pemerintah pusat menyediakan barang dan jasa publik secara seragam.

Teori *fiscal federalism* menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai dengan desentralisasi fiskal melalui pelaksanaan otonomi daerah. Dimana desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan terkait dengan pengambilan keputusan kepada pemerintah tingkat rendah (Akai dan Sakata, 2002) yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi sektor publik jangka panjang (Faridi, 2011). Aristovnik (2012) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat dibagi menjadi dua luas kategori yaitu: (i) otonomi fiskal pemerintah daerah, dan (ii) pentingnya fiskal pemerintah daerah. Dengan menerapkan sistem pemerintahan terdesentralisasi, pemerintah daerah akan dikejar untuk meningkatkan usahanya dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik di wilayahnya (Suhardjanto, et.al., 2009). Menurut Oates (1993) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), karena pemerintah daerah (*local government*) akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik.

Federalisme fiskal menampilkan model normatif yang menggambarkan pemerintah pusat sebagai penafsir arif aspirasi masyarakat, yang memberikan arahan dalam aturan-aturan kelembagaan antar pemerintahan untuk menjamin lembaga-lembaga pemerintah daerah bertindak sesuai keinginan pusat (dengan asumsi sesuai keinginan seluruh rakyat). Bahkan walaupun tak semua pemerintah pusat tidak sedemikian arif,

aturan-aturan ini mungkin masih dapat memberikan rujukan yang bermanfaat dalam hubungan fiskal antar pemerintahan (Bird and Villancourt, 1998).

2.6. Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran adalah hasil dari perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam bentuk uang dalam jangka waktu tertentu (Syamsi, 1994 dalam Hanafi dan Nugroho, 2009). Senada dengan itu, Mardiasmo (2004) juga menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan defisit atau surplus.

Anggaran yang disusun oleh pemerintah pusat maupun daerah akan disesuaikan dengan tujuan yang diharapkan yaitu untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi rakyat. Sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003, penyusunan anggaran daerah atau sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja merupakan teknik

penganggaran yang mengikuti pendekatan *New Public Management*. *New Public Management* berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan kebijakan. Penggunaan paradigma *New Public Management* menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah, diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (*cost cutting*), dan kompetensi tender (Hanafi dan Nugroho, 2009). *New Public Management* memberikan perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana, melainkan telah mengubah peran pemerintah, terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

2.7. APBD Dalam Era Otonomi Daerah

APBD menurut Mamesah (1995:20) dalam Halim (2007: 16) adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah, di mana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Era pasca reformasi, bentuk APBD mengalami perubahan cukup mendasar. Bentuk APBD yang baru didasari pada peraturan-peraturan

mengenai Otonomi Daerah terutama UU Nomor 22/1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir kalinya mengalami perubahan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2015.

UU Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi pengelolaan keuangan daerah. APBD menunjukkan sumber pendapatan daerah, berapa besar alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan, serta pembiayaan yang muncul bila terjadi surplus atau defisit. Dengan adanya APBD, pemerintah memiliki gambaran mengenai pendapatan dan sumber pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah dapat berupa pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanjanya. Selanjutnya pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.8. Kinerja Keuangan Daerah (Fiskal)

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk keuangan tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Terkait dengan pentingnya kinerja, maka yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai tingkat besarnya penyimpangan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan. Dengan mengetahui penyimpangan tersebut, dapat dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja (Rai, 2008). Dalam lingkup perusahaan, pengukuran kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen merupakan persoalan yang lebih kompleks dan lebih sulit, karena akan menyangkut masalah efektivitas pemanfaatan modal, efisiensi dan rentabilitas dari kegiatan perusahaan dan menyangkut nilai serta keamanan dari berbagai tuntutan dari pihak ketiga (Helfert, 1982).

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Sularso dan Restianto, 2011). Syamsi (1986) dalam Susantih dan Saftiana (2009) menyatakan kinerja keuangan pemerintah

daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah (PAD) guna memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat, sehingga memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan.

Penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, namun pada lembaga publik, khususnya pemerintah daerah, masih sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan penyajian laporan keuangan pada pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh perusahaan yang bersifat komersil. Di samping itu, penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD (Halim, 2007).

Beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur atau menganalisis kinerja keuangan/fiskal daerah diantaranya rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan

rasio efektivitas PAD. Rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010:142). Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010:142). Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah (Mahmudi, 2010:142). Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan anggaran PAD (Mahmudi, 2010:143).

2.6.1. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Bisma dan Susanto (2010 : 78) menyatakan bahwa tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan

desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan.

2.6.2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemda diharapkan bisa menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.6.3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan

transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio PAD terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman (Bisma dan Susanto, 2010:77). Formula untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah, sebagai berikut:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer (Pusat dan Propinsi) + Pinjaman}} \times 100\%$$

2.6.4. Rasio Efektivitas PAD

Keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan, salah satunya bisa diukur dengan efektivitas pelaksanaan anggaran tersebut. Hal tersebut bisa diketahui dengan mengukur rasio efektivitas. Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan (Bisma dan Susanto, 2010: 78).

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

2.9. Kebijakan Fiskal untuk Pembangunan Ekonomi

Kebijakan fiskal diberlakukan pemerintah sebagai sarana fasilitasi dalam penstabilan anggaran keuangan. Kebijakan fiskal berperan dalam memacu laju pertumbuhan daerah sebagai dasar pembangunan nasional. Kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakkan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan berikut : 1) untuk meningkatkan laju investasi; 2) untuk mendorong investasi optimal secara sosial; 3) meningkatkan kesempatan kerja; 4) untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan internasional; 5) untuk menanggulangi inflasi; dan 6) untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional (Rindayati, 2009). Dalam hal ini kebijakan fiskal merujuk kepada ukuran-ukuran fiskal yang kompleks seperti pajak, subsidi dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Dengan mengontrol antara 15 sampai 50 persen dari GDP, pemerintah merupakan kekuatan utama dalam menggerakkan perekonomian dibanyak negara berkembang. Jadi berdasarkan volume, kebijakan fiskal berpengaruh secara substansial pada semua lingkaran ekonomi. Kebijakan fiskal memengaruhi kegiatan perekonomian melalui : 1) alokasi dari sumber anggaran terhadap berbagai kegiatan yang merupakan pengeluaran publik, 2) bentuk-bentuk pembiayaan dalam pengeluaran pemerintah dan 3) keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah (Todaro, 2000; Musgrave and Peggy, 1989; Jhingan, 2000; Rindayati, 2009).

Tantangan dalam penerapan desentralisasi fiskal tidak hanya dalam penentuan strategi pembiayaan yang tepat tetapi juga kepada masalah

pengendalian defisit anggaran. Defisit anggaran merupakan penyebab utama ketidakseimbangan makroekonomi, dan mengurangi defisit anggaran merupakan komponen utama pada kebanyakan program penyesuaian. Secara prinsip pengurangan defisit anggaran dapat dilakukan melalui dua hal : 1) dapat dikurangi melalui pengeluaran anggaran, dan 2) peningkatan pendapatan pemerintah.

Walaupun kedua pendekatan tersebut digunakan secara bersamaan, penekanan diberikan kepada pendekatan pertama karena alasan sebagai berikut: 1) Pengurangan pengeluaran anggaran lebih mudah, lebih substansial dan lebih cepat pengurangannya dibandingkan meningkatkan pajak serta peningkatan pajak pendapatan sering memerlukan perubahan dalam sistem pajak dan aturan mengenai pajak yang memakan waktu. 2) Tujuan utama dari program penyesuaian secara struktural adalah dalam arti luas mengurangi aturan negara dalam perekonomian dan menyiapkan insentif untuk meningkatkan produksi serta peningkatan pajak untuk mengelola tingkat pengeluaran yang ada akan bertentangan dengan tujuan dari program penyesuaian struktural (Jhingan, 2000; Todaro, 2000).

Dampak dari pengurangan defisit anggaran dan pengaruhnya terhadap ketahanan pangan dapat dikaji lebih lanjut melalui : 1) pengurangan tenaga kerja di sektor publik dan upah, 2) pengurangan investasi publik, 3) pengurangan subsidi dan 4) pengurangan/pemotongan pelayanan publik. Kebijakan fiskal dengan pengurangan pengeluaran publik akan mempengaruhi ekonomi pangan dan ketahanan pangan melalui pengaruh pada harga dan volume dari penawaran dan permintaan tenaga kerja, kredit,

komoditi yang dipasarkan dan menyebabkan perubahan dalam infrastruktur sosial dan ekonomi. Penekanan khusus pada pendapatan rumah tangga, permintaan pangan dan produksi pangan. Arah dan intensitas dari pengaruh tersebut tergantung pada pendekatan terhadap pengeluaran untuk publik, kondisi sosial dan ekonomi suatu negara, kerangka waktu dan pada suksesnya program penyesuaian yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi (Rindayati, 2009).

2.10. Belanja Modal

Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Belanja modal yaitu pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan (Mardiasmo, 2004). Belanja modal secara umum dialokasikan untuk sarana dan prasarana publik, dalam bentuk aset tetap yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan aset tetap lainnya, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah/SAP). Dalam SAP, belanja modal dapat dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori utama antara lain, belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya.

Belanja modal memiliki peran yang sangat penting guna meningkatkan infrastruktur publik, sehingga dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Mardiasmo (2009:93) menyatakan bahwa secara normatif semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan.

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan penambahan penduduk. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas (Ismerdekaningsih dan Rahayu, 2002). Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah (Harianto dan Adi, 2007). Daniel (2014) menemukan bahwa keserasian belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan pada variabel daya saing. Ini

berarti semakin tinggi alokasi belanja modal semakin tinggi daya saing daerah.

Menurut Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesoebroto (1997:171), model belanja modal pemerintah dibedakan menjadi tiga tahap yaitu tahap awal, menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Menurut Suparmoko (2000:176) bahwa belanja atau pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang;
2. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat;
3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang;

4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

2.11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Menurut UNDP, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*a process of enlarging people's choices*). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas, dan pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP (*Human Development Report/HDR*, 1995:103), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian;
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja;

3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal;
4. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan;
5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Berdasarkan konsep tersebut, penduduk di tempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Produktifitas

Penduduk harus meningkatkan produktifitas dan partisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Produktifitas dan partisipasi penduduk dapat tercipta bila penduduk memiliki pendidikan dan kesehatan yang baik. Selanjutnya pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas serta berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan meningkatkan daya beli penduduk.

2. Pemerataan

Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Akses tersebut dapat berupa

sarana dan prasarana publik yang memperlancar aktifitas ekonomi dan sosial penduduk. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.

4. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan kehidupan mereka serta untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan.

IPM merupakan indikator penting dan bermanfaat untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pada tahun 2015, metodologi IPM mengalami perubahan karena beberapa alasan, yaitu:

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam

mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Selain itu, indikator PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

2. Kegunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Perubahannya adalah Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Penghitungan metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Selain itu, dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan alat dari pembangunan. Ini sependapat dengan

Anand dan Sen (2000) yang mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk primer dan sarana utama dalam pembangunan. Ranis dan Stewart (2001) mengemukakan bahwa pembangunan manusia secara luas didefinisikan sebagai mengusahakan orang-orang untuk untuk menjalani hidup lebih lama, lebih sehat dan lebih penuh. Secara sempit, pembangunan manusia diinterpretasikan sebagai refleksi dari status kesehatan dan pendidikan manusia.

UNDP telah melaksanakan penelitian dan menerbitkan buku Laporan Pembangunan Manusia (HDR) yang berisi mengenai perkembangan indeks HDI di seluruh dunia dan pembahasan komprehensif mengenai suatu aspek pembangunan manusia yang menjadi permasalahan dan kepedulian global. IPM ini merupakan indeks komposit atas 3 indeks, yaitu (BPS, 2015):

1. Indeks harapan hidup

Indeks ini sebagai perwujudan dimensi umur panjang dan sehat (*longevity*). Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam perhitungannya, yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Besarnya nilai maksimum dan minimumnya telah disepakati oleh semua Negara (175 negara) sebagai standar UNDP, yakni 85 tahun sebagai batas atas dan 25 tahun sebagai batas terendah.

2. Indeks pendidikan

Indeks ini sebagai perwujudan dimensi pengetahuan (*knowledge*). Perhitungannya menggunakan dua indikator, yaitu : angka harapan lama sekolah (*Expected Years of Schooling - EYS*) dan rata-rata lama sekolah (*Man Years School [MYS]*).

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani atau sedang menjalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan yang tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas serta berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi (Lanjouw, *et. al.*, 2001). Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan kualitas pembangunan manusia.

3. Indeks standar hidup layak

Indeks ini sebagai perwujudan dimensi hidup layak (*decent living*). Perhitungan UNDP menggunakan Produk Domestik Bruto riil yang disesuaikan, sedangkan BPS menggunakan nilai pengeluaran per kapita

dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao dan dihitung dari bundel komoditas makanan dan non makanan.

Agar dapat melihat perkembangan tingkatan dan status IPM UNDP membedakan tingkat IPM berdasarkan empat klasifikasi yakni: rendah (IPM kurang dari 60), sedang (IPM antara 60 dan 70), tinggi (IPM antara 70 dan 80) dan sangat tinggi (IPM 80 ke atas).

Perlu dicatat bahwa IPM mengukur tingkat pembangunan manusia secara relatif, bukan absolut. Pengukuran IPM telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali dicetuskan dan yang terpenting adalah indeks tersebut telah disederhanakan sehingga sekarang IPM dihitung secara langsung.

Pertumbuhan dalam modal fisik bisa saja melimpah ke modal manusia melalui investasi swasta dalam riset dan pengembangan serta pelatihan dalam teknologi yang lebih tinggi yakni dalam pertumbuhan yang didorong oleh teknologi. Untuk dapat melestarikan pertumbuhan angkatan kerja sebagian besar (dan semakin meningkat besarnya) harus memiliki latar belakang sekolah umum yang cukup supaya dapat menguasai keterampilan teknologi serta berpartisipasi dalam perluasan aktivitas riset dan

pengembangan. Oleh karena itu, sekolah umum yang disediakan secara publik dan pengetahuan yang dihasilkan secara privat bersifat komplementer.

2.12. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel dan Metode Analisis	Hasil Empiris
1.	Christy, <i>et. al.</i> (2009)	Variabel dependen adalah IPM, variabel independen adalah belanja modal dan DAU. Penelitian ini mengambil daerah penelitian kabupaten/kota di Jawa Tengah, yaitu 29 kabupaten dan 6 kota. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik inferensia dengan menggunakan regresi sederhana (<i>simple regression</i>)	DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal, dan belanja modal berpengaruh terhadap IPM atau <i>Human Development Index</i> (HDI). Hal ini menunjukkan besarnya alokasi belanja modal akan menentukan pengalokasian dana bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari tingkat IPM
2.	Batafor (2011)	Variabel dependen adalah IPM, variabel independen adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja. Teknik analisis dengan menggunakan analisis uji beda dua rata-rata untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara periode I dan periode II untuk masing-masing variabel penelitian.	Peningkatan kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja menyebabkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM
3.	Denni (2012)	Variabel dependen adalah IPM, variabel independen adalah pertumbuhan ekonomi dan belanja modal. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari BPS Jateng khususnya data tahun 2006 s.d. tahun 2009. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan <i>time series</i> dan <i>cross section</i> . Data <i>time series</i> periode tahun 2006–2009 sedangkan data <i>cross section</i> adalah 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Berdasarkan uji Chow dan Hausman, model yang dipilih adalah <i>fixed effect</i> .	Perkembangan IPM mengalami peningkatan dengan kategori IPM menengah selama periode tahun 2006-2009 hingga mampu mencapai target IPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan hasil regresi panel menunjukkan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dan Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM
4.	Titin (2012)	Variabel dependen adalah IPM, variabel independen adalah alokasi belanja langsung. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data realisasi belanja langsung pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan pada tahun 2010. Dalam penelitian ini digunakan teknik	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belanja langsung tidak dapat memprediksi IPM

No.	Peneliti	Variabel dan Metode Analisis	Hasil Empiris
		analisis statistik inferensial dengan menggunakan regresi sederhana (<i>simple regression</i>).	
5.	Lilis dan Yohana (2012)	Variabel dependen adalah IPM, variabel independen adalah pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, PAD. Populasi yang diamati dalam Penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten dan kota se Jawa Tengah, pengambilan sampel dilakukan berdasarkan metode <i>purposive sample</i> .	PE terbukti tidak berpengaruh positif terhadap IPM melalui pengalokasian anggaran belanja modal (PABM). DAU, DAK, PAD terbukti berpengaruh positif terhadap IPM melalui PABM. PABM terbukti berpengaruh positif terhadap IPM.
6.	Hendarmin (2012)	Variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan variabel independen adalah belanja modal dan investasi swasta. Pengumpulan data bersifat makro, meliputi data tahunan dari 14 kabupaten/kota provinsi Kalimantan Barat, dengan periode pengamatan selama lima tahun terakhir; yang berarti jumlah data yang dikumpulkan adalah sekitar 70 unit (data panel). Data yang digunakan diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian berbasis pada menjelaskan (<i>explanatory</i>), yaitu penelitian untuk menguji dan menjelaskan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen (sebab-akibat).	Terhadap pertumbuhan ekonomi, hanya variabel investasi swasta yang memiliki pengaruh signifikan namun koefisiennya <i>berslope</i> negatif; sementara variabel belanja modal walaupun memiliki <i>slope</i> positif namun tidak signifikan. Terhadap kesempatan kerja, hanya variabel belanja modal yang memiliki pengaruh signifikan dan memiliki koefisien yang positif; sementara variabel investasi swasta walaupun memiliki <i>slope</i> positif namun tidak signifikan. Terhadap kesejahteraan masyarakat, pengaruh belanja modal dan investasi swasta melalui jalur pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, namun <i>slope</i> dari pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai yang negatif. Secara umum, untuk meningkatkan kesejahteraan di Kalimantan Barat jalur yang dapat digunakan adalah peningkatan belanja modal pemerintah daerah sehingga dapat memperluas kesempatan kerja, yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7.	Nur (2013)	Variabel dependen adalah IPM, variabel independen adalah pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi data panel model efek tetap (FEM) dengan metode <i>Generalized Least Square</i> (GLS)	Pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah baik secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap IPM.
8.	Swandewi (2014)	Variabel dependen adalah kesejahteraan masyarakat, variabel independen adalah dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah. Penelitiannya menggunakan metode analisis jalur yang merupakan pengembangan dari metode regresi	Dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keserasian anggaran, namun dana perimbangan tidak signifikan pada tingkat signifikansi lima persen. Kemandirian keuangan daerah, dana perimbangan, dan keserasian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui keserasian anggaran, sedangkan kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui keserasian anggaran

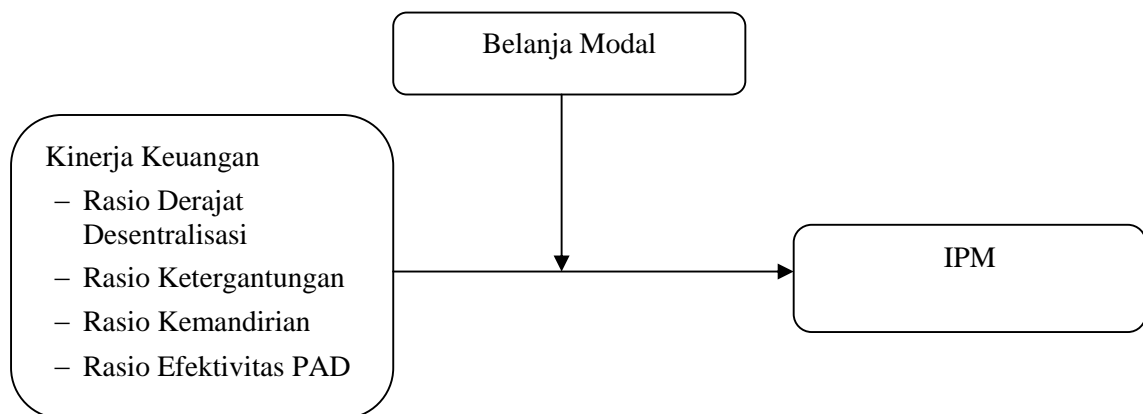
No.	Peneliti	Variabel dan Metode Analisis	Hasil Empiris
9.	Amalia dan Purbadharmaja (2014)	Variabel dependen adalah IPM, variabel independen adalah kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja. Data-data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali periode 2008-2012. Teknik analisis yang digunakan adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja serta regresi linear berganda	Kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012. Kemandirian keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012. Keserasian alokasi belanja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012.
10	Adiputra, <i>et. al.</i> (2015)	Variabel dependen adalah IPM, variabel independen adalah PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA. Data-data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota di Bali periode 2008-2013 dan DJPK. Sampel penelitian adalah 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh secara langsung hanya PAD dan SILPA yang berpengaruh terhadap IPM. Sedangkan pengaruh secara tidak langsung, PAD dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap IPM melalui alokasi belanja modal.
10	Angraini (2015)	Variabel dependen adalah IPM, variabel independen adalah rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, efektivitas PAD, dan efektivitas pajak daerah. Sampel penelitian diperoleh menggunakan <i>purposive sampling</i> dengan kriteria pemilihan sampel yaitu: pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2010-2012; pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2010-2012 yang menerbitkan LKPD dan telah diaudit; pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2010-2012 yang mempunyai nilai IPM yang dipublikasikan oleh BPS. Penelitiannya menggunakan model analisis regresi berganda	Rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan namun memiliki hubungan yang negatif terhadap IPM. Sedangkan, rasio ketergantungan keuangan daerah, efektivitas PAD, dan efektivitas pajak daerah tidak berpengaruh terhadap IPM.

No.	Peneliti	Variabel dan Metode Analisis	Hasil Empiris
11.	Suciati, <i>et. al.</i> (2015)	Variabel dependen adalah IPM, variabel independen adalah jumlah penduduk, dana perimbangan dan investasi, variabel intervening adalah belanja langsung.. Rancangan penelitian menggunakan metode analisis jalur (<i>path analysis</i>).	Jumlah penduduk berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, namun dana perimbangan dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali pada Tahun 2007-2012. Namun terdapat pengaruh yang positif dan signifikan jumlah penduduk, dana perimbangan dan investasi secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja langsung.
12.	Suryaningsih, <i>et. al.</i> (2015)	Variabel dependen adalah IPM, variabel independen adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas keuangan daerah, dan upaya pemungutan PAD. Penelitian menggunakan data panel selama tahun 2001-2011. Penelitian dianalisis dengan teknik analisis faktor, analisis jalur, dan Uji Sobel.	Kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2001 sampai 2011, dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas keuangan daerah, dan upaya pemungutan PAD sebagai indikator kinerja keuangan daerah
13.	Sandri, <i>et. al</i> (2016)	Variabel dependen adalah IPM, variabel independen adalah rasio pajak, upaya pajak, ruang fiskal, dan pajak per kapita, variabel moderasi adalah alokasi belanja modal. Penelitian dilakukan terhadap sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali yang terdiri dari delapan kabupaten dan satu kota dengan data panel dari periode 2008 hingga 2013. Data berjumlah 54 amatan (9 kabupaten/kota x 6 tahun), dengan sampel jenuh. Data sekunder yang digunakan adalah laporan realisasi APBD dan IPM tahun 2008-2013 yang dikeluarkan BPS Provinsi Bali. Teknik analisis data menggunakan <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA), namun sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik (uji normalitas residual, uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas), perumusan model MRA, koefisien determinasi, uji kelayakan model dengan uji f, uji t dan uji hipotesis.	Alokasi belanja modal menurunkan pengaruh rasio pajak pada IPM, alokasi belanja modal meningkatkan pengaruh upaya pajak dan ruang fiskal pada IPM, serta alokasi belanja modal tidak memoderasi pengaruh pajak per kapita pada IPM kabupaten/kota di Propinsi Bali.
14.	Sari dan Supadmi (2016)	Variabel dependen adalah IPM, variabel independen adalah PAD dan belanja modal. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Biro	PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan pada peningkatan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2008-2013. Hal ini berarti, semakin meningkat PAD, maka peningkatan

No.	Peneliti	Variabel dan Metode Analisis	Hasil Empiris
		Keuangan Provinsi Bali dalam bentuk Laporan Realisasi APBD tahun 2009-2013 dan data IPM tahun 2008-2013 yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Bali. Penelitiannya menggunakan teknik analisis regresi berganda.	IPM juga meningkat. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan pada Peningkatan IPM Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hal ini berarti, semakin meningkat belanja modal, maka peningkatan IPM juga meningkat

2.13. Model Penelitian

Model penelitian merupakan hubungan logis dari landasan teoritis dan kajian empiris yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1
Model Penelitian

2.14. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, kajian teori yang relevan, dan penelitian terdahulu, berikut ini hipotesis penelitian yang digunakan:

1. Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010:142). Melalui rasio derajat desentralisasi dapat diketahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan desentralisasi dengan cara meningkatkan PAD.

Semakin besar PAD yang diperoleh maka semakin leluasa pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran yang secara langsung dapat dirasakan masyarakat, yaitu peningkatan indeks harapan hidup, pendidikan, dan paritas daya beli yang ketiganya merupakan dasar pengukuran IPM.

Anggraini (2015) meneliti pengaruh rasio kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap IPM. Hasil penelitiannya antara lain menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap IPM.

Berdasarkan bukti-bukti empiris dan kajian teoritis, disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap IPM

2. Rasio ketergantungan keuangan daerah membandingkan pendapatan transfer dengan total pendapatan yang diperoleh suatu daerah. Rasio tersebut ditujukan untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan pendanaan pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah propinsi dan pusat. Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin tinggi pula tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintah propinsi dan pusat (Mahmudi, 2010:142). Rendahnya ketergantungan keuangan daerah berarti pemerintah kabupaten/kota mampu membiayai sendiri pengeluaran daerah yang secara langsung dapat dirasakan masyarakat dan mendukung peningkatan pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat baik terhadap barang konsumsi dan non konsumsi.

Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Halim, 2007). Waluyo (2007) menyatakan bahwa idealnya semua pengeluaran daerah dapat dipenuhi dengan menggunakan PAD sehingga daerah dapat benar-benar otonom, tidak lagi tergantung ke pemerintah pusat.

Berdasarkan kajian teoritis, disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Rasio ketergantungan keuangan berpengaruh negatif terhadap
IPM

3. Kemandirian keuangan daerah menggambarkan seberapa besar daerah mampu untuk mandiri dalam membiayai kegiatan pada daerahnya. Dengan kata lain rasio ini dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap sumber daya yang berasal dari eksternal. Kemandirian setiap daerah tentunya berbeda-beda, sesuai dengan sumber daya daerah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan daerah (Mahmudi, 2010:142). Semakin tinggi rasio tersebut maka semakin besar keleluasaan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat seperti ketersediaan bangunan/gedung sekolah yang layak, peralatan kesehatan secara lengkap yang mendukung kegiatan pelayanan kesehatan, dan keterjangkauan harga komoditas baik makanan atau non makanan.

Amalia dan Purbadharmaja (2014) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan

terhadap IPM. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Swandewi (2014) juga mengemukakan hasil bahwa rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Berdasarkan bukti-bukti empiris dan kajian teoritis, disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap IPM

4. Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan yang tinggi belum tentu dapat melaksanakan tugas penyediaan layanan publiknya secara baik jika pendapatan yang diterima tidak dikelola dengan baik. Tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya bergantung pada nominal pendapatannya, namun juga tata cara pengelolaannya.

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Pemerintah daerah yang mengelola PAD secara efektif diharapkan memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dalam hal penyediaan layanan publik khususnya yang terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya yang mempengaruhi paritas daya beli masyarakat serta menjadi indikator IPM.

Suryaningsih, *et.al* (2015) menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Indikator kinerja keuangan tersebut antara lain

menggunakan rasio efektivitas keuangan daerah, dan upaya pemungutan PAD.

Berdasarkan bukti-bukti empiris dan kajian teoritis, disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4: Rasio efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap IPM

5. Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Mardiasmo (2009:93) menyatakan bahwa secara normatif semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan. Investasi modal yang disediakan pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung aspek pembangunan manusia di suatu wilayah, seperti gedung/bangunan sekolah yang layak dan ketersediaan alat peraga atau laboratorium di setiap sekolah yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar-mengajar, gedung/bangunan FKTP atau puskesmas yang nyaman dan ketersediaan alat kesehatan (alkes) yang memadai di setiap FKTP, serta infrastruktur jalan/jembatan yang memperlancar akses transportasi dan aktifitas ekonomi suatu wilayah untuk meningkatkan paritas daya beli masyarakat baik komoditas makanan dan non makanan. Alexiou (2009) dan Rahayu (2004) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk investasi publik menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Christy, *et. al.* (2009) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap IPM atau *Human Development Index* (HDI). Hal ini menunjukkan besarnya alokasi belanja modal akan menentukan pengalokasian dana bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari tingkat IPM. Denni (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

H5: Alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap IPM

6. Rasio derajat desentralisasi menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan desentralisasi dengan cara meningkatkan PAD. Semakin banyak PAD yang diperoleh maka pemerintah daerah semakin leluasa untuk membiayai pengeluaran khususnya belanja modal yang menunjang perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, serta produktifitas ekonomi masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat baik terhadap komoditas makanan dan non makanan.

Sari dan Supadmi (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan pada peningkatan IPM. Lilis dan Yohana (2012) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa PAD terbukti berpengaruh positif terhadap IPM melalui alokasi belanja modal.

Berdasarkan bukti-bukti empiris dan kajian teoritis, disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H6: Alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio derajat desentralisasi terhadap IPM

7. Rasio ketergantungan keuangan daerah membandingkan pendapatan transfer dengan total pendapatan yang diperoleh suatu daerah. Rasio tersebut ditujukan untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintah provinsi dan pusat. Semakin kecil ketergantungan keuangan daerah, pemerintah daerah akan lebih leluasa untuk membelanjakan PAD untuk investasi publik bagi pelayanan dasar masyarakat seperti pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) pada sekolah yang memiliki keterbatasan ruang belajar mengajar dan pengadaan puskesmas pembantu (pustu) beserta fasilitas kesehatannya untuk menjangkau wilayah terpencil atau memiliki indeks harapan hidup yang rendah.

Menurut Halim (2007), ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Syamsi (1986) dalam Susantih dan Saftiana (2009) menyatakan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah (PAD) guna memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat, sehingga memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut.

Alexiou (2009) dan Rahayu (2004) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk investasi publik menghasilkan dampak

positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penyediaan infrastruktur di berbagai bidang baik jaringan, jalan, sarana pendidikan dan juga pembangunan fasilitas kesehatan diharapkan mendorong kualitas hidup dan tingkat kecerdasan masyarakat. Belanja modal daerah seperti penyediaan gedung, sarana dan prasarana sekolah menciptakan kenyamanan pendidikan yang selanjutnya mendorong kualitas pembangunan manusia (Christy *et. al*, 2009).

Berdasarkan kajian teoritis, disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H7: Alokasi belanja modal memperlemah pengaruh rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap IPM

8. Kemandirian keuangan daerah menggambarkan seberapa besar daerah mampu untuk mandiri dalam membiayai kegiatan pada daerahnya. Rasio kemandirian keuangan daerah diperoleh dengan membandingkan PAD dengan pendapatan yang diperoleh dari pendapatan transfer dan pinjaman daerah. Semakin besar kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah akan lebih leluasa untuk membelanjakan PAD untuk investasi publik di berbagai bidang pendidikan dan kesehatan seperti pengadaan laptop/komputer untuk sarana laboratorium sekolah, dan pengadaan alat transportasi air untuk pelayanan kesehatan di wilayah yang tidak dapat ditempuh dengan perjalanan darat dari wilayah tersebut ke pusat kota.

Desentralisasi fiskal pada dasarnya berkaitan dengan dua hal pokok, yakni kemandirian daerah dalam memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik dan pembangunan, dan kemandirian

daerah dalam memperoleh pendapatan untuk membiayai pengeluaran tersebut (Muluk, 2005).

Lilis dan Yohana (2012) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa DAU dan DAK yang merupakan komponen pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan PAD terbukti berpengaruh positif terhadap IPM melalui alokasi belanja modal.

Berdasarkan bukti-bukti empiris dan kajian teoritis, disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H8: Alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap IPM

9. Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Pemerintah daerah yang secara efektif mampu merealisasikan PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menggunakan sumber daya keuangan tersebut untuk merealisasikan belanja modal atau investasi publik yang dapat mendukung aspek pembangunan manusia di wilayahnya seperti pembangunan gedung sekolah, pengadaan alat kesehatan pada FKTP, dan pengadaan alat laboratorium pada sekolah sesuai kebutuhan. Realisasi belanja modal atau investasi publik tersebut dapat disesuaikan dengan realisasi pencapaian target PAD tanpa harus terikat dengan realisasi pendapatan daerah dari pemerintah pusat dan/atau provinsi.

Lilis dan Yohana (2012) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa PAD terbukti berpengaruh positif terhadap IPM melalui alokasi belanja

modal. Amalia dan Purbadharmaja (2014) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah yang ditunjukkan dengan PAD dan keserasian alokasi belanja untuk kepentingan publik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Berdasarkan bukti-bukti empiris dan kajian teoritis, disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H9: Alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap IPM

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel.

3.2. Populasi dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 1999). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2011-2015 sebanyak 15.

Sampel adalah sekelompok atau beberapa bagian dari suatu populasi (Indriantoro dan Supomo, 1999). Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling method* (Sugiono, 2012), yaitu sebanyak 14 kabupaten/kota, kecuali Kabupaten Pesisir Barat karena tidak memenuhi kriteria sampel. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) *audited* untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Desember 2010-2015;
2. Memiliki data IPM (metode baru) yang lengkap selama 2011-2015.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah:

1. Data pendapatan daerah berupa PAD, dana perimbangan/transfer, pinjaman daerah, data belanja modal, LRA (*audited*) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2010-2015, yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
2. Data IPM yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan sehingga dapat dianalisis, maka diperlukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperlukan, pencatatan dan penghitungan. Data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif, yaitu berupa angka dan bersifat objektif.

3.5. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu gejala yang bervariasi. Variabel juga dapat diartikan sebagai obyek penelitian yang menjadi titik pusat perhatian dari suatu penelitian (Arikunto: 1998: 99). Variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel Dependen, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2. Variabel Independen, yaitu Kinerja Keuangan yang terdiri dari
 - a. Rasio Derajat Desentralisasi (DD)
 - b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (TKD)
 - c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (MKD)
 - d. Rasio Efektivitas PAD (EPAD)
3. Variabel Pemoderasi, yaitu Belanja Modal (BM)

3.6. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional adalah memberikan pengertian terhadap suatu variabel dengan menspesifikasikan kegiatan atau tindakan yang diperlukan peneliti untuk mengukur atau memanipulasinya (Sularso, 2003). Dalam penelitian ini definisi operasional dan pengukuran variabel, sebagai berikut:

1. IPM, yaitu menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak. Empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

IPM merupakan rata-rata dari ketiga komponen, yaitu :

- a. Indeks harapan hidup, sebagai perwujudan dimensi umur panjang dan sehat (*longevity*)
- b. Indeks pendidikan, sebagai perwujudan dimensi pengetahuan (*knowledge*)

c. Indeks standar hidup layak, sebagai perwujudan dimensi hidup layak (*decent living*)

2. Kinerja Keuangan yang terdiri dari:

a. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \dots (1)$$

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \dots (2)$$

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah

pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Formula untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah, sebagai berikut:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer (Pusat dan Propinsi) + Pinjaman}} \times 100\% \dots (3)$$

d. Rasio Efektivitas PAD

Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD (anggaran). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\% \dots (4)$$

3. Belanja modal adalah jumlah realisasi seluruh belanja pembangunan seperti infrastruktur, investasi baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, yang digunakan untuk mendapatkan aset yang memiliki kegunaan lebih dari satu tahun dibandingkan dengan jumlah pengeluaran dalam APBD. Belanja modal meliputi belanja tanah, gedung dan bangunan, belanja peralatan dan mesin, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya. Belanja modal yang

dimaksud adalah perbandingan realisasi belanja modal pada t_0 dengan belanja daerah pada t_0 , karena dampak realisasi belanja modal pada tahun berjalan baru dirasakan di tahun berikutnya.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan menggunakan data panel yang merupakan kombinasi data *time series* dan *cross section* dengan bantuan aplikasi *Eviews*. Tahap analisis yang dilakukan adalah uji statistik deskriptif, analisis regresi data panel, MRA, pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis yang dijelaskan sebagai berikut:

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif terdiri dari penghitungan *mean*, simpangan baku, nilai maksimum, dan minimum dari suatu distribusi data. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut (Ghozali dan Ratmono, 2013). Analisis ini akan memberi penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian yaitu kinerja keuangan terhadap IPM dengan belanja modal sebagai variabel moderasi.

3.7.2 Analisis Regresi Data Panel

Data panel yaitu gabungan antara data *time series* dan *cross-section*. Data panel sering disebut juga *pooled data* (*pooling time series* dan

cross-section), *micropanel data*, *longitudinal data*, dan *cohort analysis* (Gujarati dan Porter, 2012).

Semua istilah ini mempunyai makna pergerakan sepanjang waktu dari unit *cross-sectional*. Secara sederhana, data panel dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan data (*dataset*) dimana perilaku unit *cross-sectional* (misalnya individu, perusahaan, negara) diamati sepanjang waktu (Ghozali dan Ratmono, 2013).

Menurut Baltagi dalam Gujarati dan Porter (2012), keunggulan dari data panel yaitu: *Pertama*, data panel mampu mengatasi heterogenitas data yang berhubungan dengan individu, perusahaan, negara bagian, negara, dan lain-lain, dari waktu ke waktu. *Kedua*, data panel memberi lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, dan sedikit kolinearitas antar variabel, lebih banyak *degree of freedom*, dan lebih efisien. *Ketiga*, data panel mempelajari observasi *cross-section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok untuk mempelajari dinamika perubahan. *Keempat*, data panel paling baik untuk mendeteksi dan mengukur dampak yang secara sederhana tidak bisa dilihat pada data *cross section* murni atau *time series* murni. *Kelima*, data panel memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit. *Keenam*, data panel dapat meminimalkan bias yang bisa terjadi jika mengagregasi individu-individu atau perusahaan-perusahaan ke dalam agregasi besar.

Menurut Gujarati dan Porter (2012), untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, antara lain terdapat tiga model, yaitu:

1. Model *Common Effect (OLS pooled)*

Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data *cross section* dan *time series* sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan entitas (individu). Adapun pendekatan yang sering dipakai adalah metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Model *Common Effect* mengabaikan adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu atau dengan kata lain perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu. Model *OLS pooled* dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$IPMit = 1 + 2.DDit + 3.TKDit + 4.MKDit + 5.EPADit + U_{it}$$

Dimana i adalah subyek ke- i dan t adalah periode waktu.

2. Model Efek Tetap (*Fixed Effect*) LSDV

Pendekatan model *Fixed Effect* mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individu adalah berbeda sedangkan *slope* antar individu adalah tetap (sama). Teknik ini menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar individu atau disebut model *Least Square Dummy Variable (LSDV)*. Akan tetapi metode ini membawa kelemahan yaitu berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Model LSDV dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$IPMit = 1 + 2.D2i + 3.D3i + 4.D4i + 5.D5i + 6.D6i + 7.D7i + 8.D8i + 9.D9i + 10.D10i + 11.D11i + 12.D12i + 13.D13i + 2.DDit + 3.TKDit + 4.MKDit + 5.EPADit + U_{it}$$

Dimana $D2i = 1$ untuk kabupaten/kota ke-2, 0 jika bukan; $D3i = 1$ untuk kabupaten/kota ke-3, 0 jika bukan; dan seterusnya. Karena dalam penelitian ini memiliki 14 kabupaten/kota, maka menggunakan 13 variabel *dummy* untuk menghindari *dummy variabel trap*.

3. Model Efek Random (*Random Effect Model/REM*)

Model *Random Effect* adalah model yang akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Teknik yang digunakan dalam model *Random Effect* adalah dengan menambahkan variabel gangguan (*error terms*) yang mungkin saja akan muncul pada hubungan antar waktu dan antar entitas. Teknik metode OLS tidak dapat digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien, sehingga lebih tepat untuk menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS). Model *REM* dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$IPMit = 1 + 2.DDit + 3.TKDit + 4.MKDit + 5.EPADit + i + U_{it}$$

Dimana i merupakan komponen *error* yang *cross section* atau spesifik individual, dan U_{it} merupakan komponen *error* gabungan *time series* dan *cross section*.

Untuk menguji permodelan regresi data panel ketiga estimasi model regresi dengan melakukan Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji

Lagrange Multiplier/LM. Ketiga pengujian tersebut ditujukan untuk menentukan apakah model data panel dapat diregresi dengan model *Common Effect*, model *Fixed Effect*, atau model *Random Effect* (Widarjono, 2007).

a. Uji *Chow* (*Chow Test*)

Chow test atau *Likelihood ratio test* adalah pengujian untuk menentukan model *common effect* atau *fixed effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Asumsi dalam *Chow test* adalah:

Ho: model mengikuti *Common Effect*

Ha: model mengikuti *Fixed Effect*

b. Uji *Hausman* (*Hausman Test*)

Apabila dari hasil uji *Chow* ditentukan bahwa model *Common Effect* yang digunakan, maka tidak perlu diuji kembali dengan Uji *Hausman*, namun apabila dari hasil Uji *Chow* tersebut ditentukan bahwa model *Fixed Effect* yang digunakan, maka harus ada uji lanjutan dengan Uji *Hausman* untuk memilih antara model *Fixed Effect* atau model *Random Effect* yang akan digunakan untuk mengestimasi regresi data panel. Pengujian yang dilakukan menggunakan *Hausman test* dengan asumsi, yaitu:

Ho: model mengikuti *Random Effect*

Ha: model mengikuti *Fixed Effect*

c. Uji *Lagrange Multiplier (LM Test)*

Uji *Lagrange Multiplier (LM test)* adalah uji untuk mengetahui apakah model *Random Effect* atau model *Common Effect* yang paling tepat digunakan. Uji signifikansi *Random Effect* ini dikembangkan oleh Breusch Pagan. Asumsi dalam *Chow test* adalah:

Ho: model mengikuti *Common Effect*

Ha: model mengikuti *Random Effect*

3.7.3 *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Variabel moderating adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:223). Sharma *et. al.* dalam Ghozali (2011) mengelompokkan variabel moderator menjadi 3 kelompok yaitu *homologizer moderator, quasi moderator dan pure moderator*, sebagaimana disajikan pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Jenis-jenis Variabel Moderator

	Berhubungan dengan kriterion dan/atau predictor	Tidak berhubungan dengan kriterion dan predictor
Tidak berinteraksi dengan predictor	Intervening, exogen, antesedent, prediktor	Moderator (<i>homologizer moderator</i>)
Berinteraksi dengan predictor	Moderator (<i>quasi moderator</i>)	Moderator (<i>pure moderator</i>)

Sumber : Ghozali (2011)

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menguji apakah suatu variabel merupakan variabel *moderating* yakni dengan melakukan uji interaksi. Regresi dengan melakukan uji interaksi (perkalian dua

atau lebih variabel independen) antar variabel disebut dengan *Moderated Regression Analysis/MRA* (Utama, 2009).

Untuk menggunakan MRA dengan satu variabel prediktor (X) maka harus membandingkan tiga persamaan regresi untuk menentukan jenis variabel moderasi. Persamaan tersebut adalah (Ghozali, 2011:229):

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + e$$

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 Z_i + e$$

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 Z_i + \beta_3 X_i Z_i + e$$

Adapun perumusan hipotesisnya adalah:

Ho : $\beta_3 = 0$, berarti tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Ha : $\beta_3 > 0$, berarti ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Sehingga pada penelitian ini, model empiris dengan metode MRA pada penelitian ini, sebagai berikut:

$$IPM = \beta_0 + \beta_1 DD + \beta_2 TKD + \beta_3 MKD + \beta_4 EPAD + \beta_5 BM + \beta_6 DD.BM + \beta_7 TKD.BM + \beta_8 MKD.BM + \beta_9 EPAD.BM + e$$

Keterangan:

IPM	=	Variabel Indeks Pembangunan Manusia
DD	=	Variabel Kinerja Keuangan Daerah berupa rasio derajat desentralisasi
TKD	=	Variabel Kinerja Keuangan Daerah berupa rasio ketergantungan keuangan daerah
MKD	=	Variabel Kinerja Keuangan Daerah berupa rasio kemandirian keuangan daerah
EPAD	=	Variabel Kinerja Keuangan Daerah berupa rasio efektivitas PAD
BM	=	Variabel Alokasi Belanja Modal
DD..BM	=	Interaksi antara variabel Kinerja Keuangan Daerah berupa rasio derajat desentralisasi dengan Alokasi Belanja Modal
TKD.BM	=	Interaksi antara variabel Kinerja Keuangan Daerah berupa

		rasio ketergantungan keuangan daerah dengan Alokasi Belanja Modal
MKD.BM	=	Interaksi antara variabel Kinerja Keuangan Daerah berupa rasio kemandirian keuangan daerah dengan Alokasi Belanja Modal
EPAD.BM	=	Interaksi antara variabel Kinerja Keuangan Daerah berupa rasio efektivitas PAD dengan Alokasi Belanja Modal
	=	Konstanta
	=	Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)
	=	Nilai residu

Variabel perkalian antara DD, TKD, MKD, EPAD dengan BM atau DD.BM, TKD.BM, MKD.BM, EPAD.BM merupakan variabel *moderating* karena menggambarkan moderasi variabel BM terhadap hubungan X dan Y.

3.7.4 Uji Asumsi Klasik

Hasil estimasi regresi yang dilakukan harus benar-benar bebas dari adanya gejala multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas maka dilakukan suatu pengujian yang disebut sebagai uji asumsi klasik. Pengujian terhadap asumsi klasik yang akan dilakukan sebagai berikut:

a. Uji Multikolinearitas

Utama (2009:94) menyatakan bahwa uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.

Pada penelitian ini untuk mendeteksi dan memastikan tidak ada multikolinearitas menggunakan pendekatan korelasi parsial antar variabel independen, yaitu jika koefisien korelasi di atas 0,85, dapat disimpulkan terjadi multikolinieritas pada model.

Sebaliknya, jika koefisien korelasi relatif rendah ($<0,85$) maka diduga model tidak mengandung unsur multikolinearitas (Ajija, 2011:35).

b. Uji Normalitas

Utama (2009:89), menyatakan uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam residual dari model regresi yang dibuat berdistribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi residual yang normal atau mendekati normal, jika tidak normal, maka prediksi yang dilakukan dengan data tersebut akan tidak baik, atau dapat memberikan hasil prediksi yang menyimpang.

Pada aplikasi *Eviews* pengujian terhadap residual terdistribusi normal atau tidak, dapat menggunakan *Jarque-Bera Test*. Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai JB (*Jarque-Bera*) dengan tingkat *alpha* 1%, 5%, 10%. Apabila nilai JB lebih besar dari 1%, 5%, 10%, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya, apabila nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal.

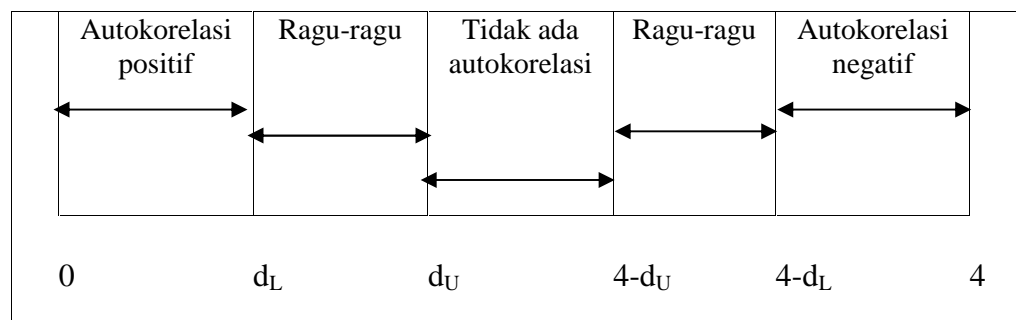
c. Uji Autokorelasi

Utama (2009:92) menyatakan uji autokorelasi dilakukan untuk melacak adanya autokorelasi atau pengaruh data dari pengamatan sebelumnya dalam model regresi. Autokorelasi muncul karena

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Pada penelitian ini, pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan statistik Durbin Watson (DW). Alasan penggunaan statistik DW karena dalam hasil analisis regresi *Eviews*, nilai statistik DW biasanya selalu dihadirkan bersamaan dengan hasil regresi variabel lainnya, sehingga uji Durbin Watson menjadi lebih mudah untuk dilakukan.

Berdasarkan tabel Durbin Watson diperoleh nilai d_L dan d_U , selanjutnya untuk menyimpulkan ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Penentuan Autokorelasi

d. Uji Heteroskedastisitas

Utama (2009:94) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung gejala heteroskedastisitas atau mempunyai varians yang homogen. Heteroskedastisitas terjadi pada saat

residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan. Pada penelitian ini, untuk mengetahui model yang dipilih (*Common Effect*, *Fixed Effect*, atau *Random Effect*) mengandung varians yang homogen (tidak terjadi heteroskedastisitas) adalah dengan cara membandingkan hasil antara model yang dipilih tersebut tanpa pembobotan (*unweighted*) dan dengan pembobotan (*cross-section weighted*). Bila tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara kedua hasil tersebut berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

3.7.5 Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan pemilihan model dan pengujian asumsi klasik terhadap model, dilakukan pengujian terhadap hipotesis, yaitu melalui uji F, koefisien determinasi (R^2), dan uji t sebagai berikut:

1. Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama).

H_0 : $\rho = 0$, berarti ada hubungan yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama).

Tingkat signifikan (α) yang digunakan adalah 1%, 5%, dan 10% dengan kriteria penilaian, yaitu:

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai probabilitas $F_{hitung} <$ nilai probabilitas α , maka H_a terdukung dan H_0 tidak terdukung, berarti variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai probabilitas $F_{hitung} >$ nilai probabilitas α , maka H_0 terdukung dan H_a tidak terdukung, berarti variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui besarnya proporsi sumbangan pengaruh dari variabel independen variabel yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas PAD terhadap variabel dependen yaitu IPM. Semakin besar R^2 maka semakin kuat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Uji Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat pada hasil regresi yang dilakukan dengan program *Eviews*, yaitu dengan membandingkan tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas dengan $\alpha = 1\%$, 5% , dan 10% . Apabila tingkat signifikansi $\leq \alpha$, maka H_0 tidak terdukung dan H_a terdukung. Sebaliknya bila tingkat signifikansi $> \alpha$, maka H_0 terdukung dan H_a tidak terdukung.

Pada penelitian ini, Uji t dilakukan terhadap model data panel yang terpilih untuk menguji hipotesis 1, 2, 3, 4, dan 5. Hipotesis 1, 2, 3, 4, dan 5 tidak terdukung apabila nilai probabilitas signifikansi t lebih besar dari α , dan sebaliknya hipotesis 1, 2, 3, 4, dan 5 terdukung apabila nilai signifikansi t lebih kecil dari α . Pengujian terhadap variabel moderasi, dilakukan menggunakan metode MRA atau uji interaksi menggunakan model empiris yang telah dijelaskan sebelumnya. Hipotesis 6, 7, 8 dan 9 tidak terdukung apabila nilai probabilitas signifikansi t lebih besar dari α , dan sebaliknya hipotesis 6, 7, 8 dan 9 terdukung apabila nilai signifikansi t lebih kecil dari α .

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan daerah berupa rasio derajat desentralisasi dan efektivitas PAD memiliki pengaruh yang signifikan dan hubungan yang positif terhadap IPM, atau hipotesis 1 dan 4 terdukung. Kedua rasio tersebut menggunakan PAD sebagai dasar pengukurannya, sehingga semakin tinggi realisasi PAD, maka pemerintah daerah memiliki sumber daya keuangan atau pendanaan yang cukup untuk penyediaan layanan publik dan diharapkan terjadi peningkatan IPM. Sebaliknya, rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan namun memiliki hubungan yang negatif terhadap IPM, atau hipotesis 3 tidak terdukung. Hal ini diduga disebabkan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman pemerintah pusat, walaupun telah berusaha mengurangi ketergantungan pendanaan dari dana transfer. Berkurangnya ketergantungan pendanaan tersebut terlihat dari rasio ketergantungan keuangan daerah yang memiliki pengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang negatif terhadap IPM, atau hipotesis 2 terdukung.
2. Alokasi belanja modal signifikan untuk memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah berupa rasio derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah terhadap IPM dan alokasi belanja modal menjadi

variabel moderasi murni (*pure moderator*) pada kedua rasio tersebut. Dalam kedudukannya sebagai variabel moderasi, alokasi belanja modal memperlemah pengaruh rasio derajat desentralisasi terhadap IPM atau hipotesis 6 tidak terdukung, dan sebaliknya alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap IPM atau hipotesis 8 terdukung. Namun alokasi belanja modal tidak signifikan untuk memoderasi dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh rasio ketergantungan keuangan daerah dan efektivitas PAD terhadap IPM atau hipotesis 7 dan 9 tidak terdukung.

Pengaruh signifikan dan hubungan yang positif antara rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas PAD, alokasi belanja modal terhadap IPM, serta hubungan yang negatif antara rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap IPM membuktikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten/kota Provinsi Lampung telah mendukung teori desentralisasi fiskal dan teori keagenan. Namun pengaruh signifikan dan hubungan yang negatif antara rasio kemandirian keuangan daerah terhadap IPM diduga karena adanya konflik keagenan dalam menetapkan pendapatan transfer dan pinjaman daerah atau disebabkan faktor lain sehingga diperlukan pendekatan interaksi dengan faktor tersebut sesuai dengan teori kontijensi.

Dukungan terhadap teori kontijensi terbukti dengan hasil pengujian bahwa adanya interaksi alokasi belanja modal dapat memperkuat pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap IPM. Selain itu, alokasi belanja modal yang memperkuat pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap IPM telah membuktikan teori pertumbuhan endogen yaitu

pentingnya akumulasi modal tetap, modal ilmu pengetahuan (*knowledge capital*), dan modal manusia (*human capital*) dalam pembangunan ekonomi daerah.

5.2. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga masih perlu untuk disempurnakan. Saran-saran yang dapat disampaikan terkait dengan keterbatasan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung agar mampu lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi dan sektor-sektor ekonomi daerah yang dapat meningkatkan PAD sehingga dapat lebih mandiri dalam membiayai kegiatan pelayanan publik dan tidak selalu tergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, dan terlebih dari pinjaman daerah yang dapat membebani APBD dengan adanya bunga pinjaman dan biaya lainnya. Peningkatan PAD yang efektif dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, seperti melakukan pendataan atas sumber daya lokal atau kekhasan daerah yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD, memutakhirkan (*up to date*) regulasi atau peraturan daerah (perda) yang mendasari pemungutan PAD, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesadaran membayar pajak/retribusi daerah, dan memberikan pelatihan atau penyuluhan kepada aparat pemungut pajak/retribusi daerah untuk memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat, serta transparansi pengelolaan PAD kepada masyarakat.

2. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung diharapkan mampu mengalokasikan belanja modal sesuai dengan kebutuhan, preferensi masyarakat, kondisi wilayah, dan untuk kegiatan yang produktif agar dapat langsung dirasakan oleh masyarakat secara merata seperti pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, dalam merencanakan alokasi belanja modal, pemerintah daerah juga diharapkan memperhatikan target pendapatan daerah yang bersumber dari APBD pemerintah daerah bersangkutan agar pencapaian target PAD (efektivitas PAD) dapat seiring dengan pencapaian target realisasi belanja modal.
3. Penelitian ini hanya menguji pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap IPM dan moderasi alokasi belanja modal dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut. Alokasi belanja modal dalam penelitian ini belum secara spesifik terkait dengan pembangunan manusia, karena keterbatasan sumber data atau informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, serta alokasi belanja modal tidak signifikan untuk memoderasi rasio ketergantungan keuangan daerah dan efektivitas PAD. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel moderasi yang lebih spesifik untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia, seperti alokasi belanja modal pada unit kerja/SKPD yang menangani bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya yang terkait dengan pembangunan

manusia, dimana data tersebut dapat diperoleh secara lengkap dari penjabaran pertanggungjawaban APBD setiap pemerintah daerah, serta menggunakan rasio kinerja keuangan yang berbeda dari penelitian ini. Selain itu, dapat menggunakan variabel investasi pihak swasta yang menanamkan modalnya di setiap wilayah kabupaten/kota sebagai variabel bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, *et. al.* 2015. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SILPA Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *E-jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3, No. 1.
- Adisasmita, R. 2013. *Teori-teori Pembangunan Ekonomi : Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah*. Yogyakarta: Graha ilmu
- Ajija, S. R. *et. al.* 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Salemba Empat: Jakarta.
- Akai, N. and Sakata, M. 2002. Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence form State-Level Cross-Section Data for the United States. *Journal of Urban Economics*, 52:93-108.
- Alexiou, C. 2009. Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SSE). *Journal of Economic and Social Research*. 11(1) : 1-16.
- Amalia, F. R. dan Purbadharmaja, I.B.P. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 3, No. 6, Juni 2014.
- Anand S. and Sen A. 2000. Human Development and Economic Sustainability. *Journal World Development*. Vol. 28 No.12
- Anggraini, T. 2015. Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Dissertasi*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Aristovnik, A. 2012. *Fiscal Decentralization in Eastern Europe: a twenty-year perspective*. MPRA Paper No. 39316, University of Ljubljana, Faculty of Administration, Slovenia.
- Arsyad, L. 1999. *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah*. BPFE. Yogyakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2015*. Lampung: BPK Perwakilan Provinsi Lampung
- _____. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2014*. Lampung: BPK Perwakilan Provinsi Lampung

- _____. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2013*. Lampung: BPK Perwakilan Provinsi Lampung
- _____. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2012*. Lampung: BPK Perwakilan Provinsi Lampung
- _____. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2011*. Lampung: BPK Perwakilan Provinsi Lampung
- _____. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2010*. Lampung: BPK Perwakilan Provinsi Lampung
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Data Sosial Kependudukan Provinsi Lampung*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2015. *Indeks Pembangunan Manusia*. Lampung: Badan Pusat Statistik
- Bahl, R. 2008. *The Pillars of Fiscal Decentralization*. *CAF Working Papers*.
- Batafor, G. G. 2011. *Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata Provinsi NTT*. *Tesis*. Bali. Universitas Udayana Denpasar.
- Bird, R. M. 1993. *Threading the Fiscal Labyrinth: Some Issues in Fiscal Decentralization*. *National Tax Journal*, 46 (3): 207-227
- Bird, R. M. dan F. Villancourt. 1998. *Fiscal Decentralization in Developing Countries: An Overview*. Cambridge. Cambridge University Press.
- Bisma, I. G dan Susanto, H. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007*. *Jurnal Gene Swara Edisi Khusus*. Vol 4.
- Budiriyanto, E. 2011. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Formulasi DAU*. Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI.
- Christy, *et. al.* 2009. *Hubungan Antara DAU, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia*. *The 3rd National Conference UKWMS Surabaya*, October 10th 2009
- Daniel, T. 2014. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi pada daya saing, dengan keserasian belanja daerah, kemandirian keuangan daerah sebagai pemoderasi (studi di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur)*. *Tesis*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Darwanto dan Yustikasari, Y. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol 08:24-31

- Denni, S.M. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal EDAJ*. 1(1).
- DJPK. 2013. *Deskripsi dan Analisis APBD 2013*. Jakarta. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Eisenhardt, K.1989. Building Theories from Case Study Research. *Academy of Management Review*. Vol. 14, No. 4, 532-550.
- Faridi, M. Z. 2011. Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*. Vol. 31, No.1 (June 2011):1-13
- Fitri, V. K. 2013. Pengaruh rasio keuangan daerah, PAD, dan DAU terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2012. Universitas Riau. Riau
- Ghozali, I. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- _____. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Cetakan Keempat)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Ghozali, I dan Ratmono, D. 2013. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Gujarati, D. N. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi ke-4. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, D. N. dan Porter, D. C. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Buku ke-2, Edisi ke-5. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ke-3. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, I. dan Nugroho, T. 2009. *Kebijakan Keuangan Daerah: Reformasi dan Model Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Harianto dan Adi, P. H. 2007. Hubungan antara DAU, Belanja Modal, PAD, dan pendapatan per kapita. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Hariyanto, B. 2005. *Esensi-esensi Bahasa Pemrograman JAVA*. Informatika. Bandung
- Helfert, E. A. 1982. *Techniques of Financial Analysis 5th Edition*. Homewood, IL: Irwin

_____. 2000. *Techniques of Financial Analysis : A Guide to Value Creation 10th Edition*. Singapore : McGraw Hill

Hendarmin, 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, *Jurnal EKSO, Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi UNTAN*. Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 , 144 –155

Husnatarina, F dan Nor, W. 2007. Pengaruh keterlibatan Pekerjaan dan Budget Impphasis dalam Hubungan atara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran. *The 1st Accounting Conference Faculty of Economic Universitas Indonesia*. Depok : 1-25. 7-9 November.

Indriantoro dan Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta

Ismerdekaningsih, H. dan Rahayu, E. S. 2002. Analisis Hubungan Penerimaan Pajak Terhadap Product Domestic Bruto di Indonesia (Studi Tahun 1985-2000). *ITB Central Library*.

Jensen, M. dan Meckling, W. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4):305-360.

Jhingan, M. L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Khomsiyah. 2012. Good Governance dan Pemberantasan Korupsi. Diakses dari www.iaiglobal.or.id.

Khusaini, M. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE Unibraw.

Kubo, Y. dan Kim, H. D. 1996. *Human Capital, Imported Technology and Economic Growth : A Comparative Study of Korea and Japan*. Institute of Policy and Planning Science University of Tsukuba. Tsukuba.

Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Kusnandar dan Siswantoro, D. 2012. Pengaruh DAU, PAD, SILPA, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.

Lanjouw, P, *et. al*. 2001. Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?. *World Bank Working Paper No. 2739*. Washington D.C.:World Bank.

Lilis, S. dan Yohana, K.S. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi DAU, DAK,PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian

- Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Prestasi*, Vol 9 (1), 2012.
- Lucas, R. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*. Vol. 22, 3-42
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Penerbit Erlangga
- Mangkoesebroto, G. 1997. *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga. BPF. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Andi.
- Musgrave and Peggy. 1989. *Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw. D.
- Muluk, K. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Nur, B. 2013. Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economic Development Analysis Journal Fakultas Ekonomi Universitas Semarang*. Vol. 2 No. 3 (2013).
- Oates, W.E. 1993. Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*, 46:2, pp. 237-43
- Rahayu, T. 2004. Peranan Sektor Publik Lokal Dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Surakarta. *Jurnal Kinerja*. Vol. VIII :133-147.
- Rai, I. G. A. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ranis, G. Dan Stewart, F. 2001. Economic Growth and Human Development. *World Development*. 28(2): 197-219
- Ridayati, W. 2009. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi Jawa Barat. *Disertasi*. Bogor: Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- _____. 1999. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- _____. 2004. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

- _____. 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- _____. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Romer, P. M.. 1990. Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, Volume 98, No. 5, pt. 2
- _____. 1994. The Origin of Endogenous Growth. *The Journal of Economic Perspectives*, Volume 8, 3-22
- Sandri *et. al.* 2016. Kemampuan Alokasi Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada IPM. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi Universitas Udayana Bali*. Vol. 21, No. 1
- Sari dan Supadmi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.15.3. ISSN: 2302-8556
- Suciati, *et. al.*. 2015. Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan dan Investasi pada Kesejahteraan Masyarakat Melalui Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi Universitas Udayana Bali*, Vol. 20 No. 2
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suhardjanto, *et. al.* 2009. The Influence of Fiscal Decentralization On The Public Expenditure in Indonesia. *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol. 13(3):233-252.
- Sularso, S. 2003. *Buku Pelengkap Metode Penelitian Akuntansi Sebuah Pendekatan Replikasi*. Edisi Revisi 2003/2004. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Sularso, H., Restianto, Y.E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, Vol.1 (2):109-124
- Suparmoko, M. 2000. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. BPFE. Yogyakarta
- Suryaningsih, *et. al.* 2015. Dampak Kinerja Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 40 (8):537-554. ISSN : 2337-3067
- Susantih, H dan Saftiana, Y. 2009. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan

Pemerintah Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Program Pascasarjana Akuntansi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Sriwijaya

Swandewi. 2014. Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Keserasian Anggaran Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 3.7 (2014) :356-376.

Titin, V. 2012. Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*. (Jenius) Vol 2:65-74.

Todaro, M.P. 2000. *Economic Development. Seventh Edition*. New York University. Addison Mesley

UNDP. 1995. *Human Development Report 1995*. Oxford University Press. New York

_____. 2013. *Human Development Report 2013*. Oxford University Press. New York

_____. 2014. *Human Development Report 2014*. Oxford University Press. New York

Utama, S. 2009. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar : Sastra Utama

Waluyo, A. 2007. *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

Widarjono, A. 2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Kedua. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UII